

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN POKER DAN TOGEL ONLINE
(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rusydi Syihab

C03215025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rusydi Syihab
NIM : C03215025
Semester : VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Perjudian Poker Dan Togel *Online* (Studi Putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Mei 2019

Saya yang menyatakan,




Muhammad Rusydi Syihab
NIM. C03215012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rusydi Syihab NIM. C03215025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Mei 2019

Pembimbing,



Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

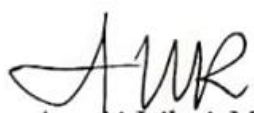
Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rusydi Syihab NIM. C03215025 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 25 Juni 2019 dan dapat diterima selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

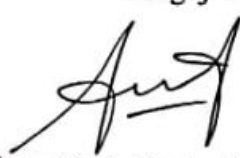
Penguji II


Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji III


H. Muhammad Ghufron, Lc. M.H.I.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV


Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 3 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rusydi Syihab
NIM : C03215025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : syihabsuggest57@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN POKER DAN TOGEL *ONLINE* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 521/PID.B/2018/PN BYW)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2019

Penulis

Muhammad Rusydi Syihab

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Perjudian Poker dan Togel Online dalam Putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yakni dengan cara bedah putusan, dokumentasi, serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan permasalahan putusan tindak pidana perjudian poker dan togel *online*, yaitu berupa sumber data primer dan sumber data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor:521/Pid.B/2018/PN Byw tentang tindak pidana perjudian poker dan togel *online* yang didasarkan pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yakni menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kedua, tindak pidana perjudian poker dan togel *online* termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* karena hukumannya belum ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis. Jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, putusan nomor 521/Pid.B/2018/PN Byw bertentangan dengan konsep hukum pidana Islam karena dalam *ta'zīr* hukuman harus didasarkan pada sumber-sumber hukum diantaranya bersumber dari Undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, namun dalam penerapannya hakim telah melanggar asas *lex specialis derogat legi generalis* yang tertuang dalam pasal 63 ayat (2) KUHP.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada aparat penegak hukum diharapkan lebih mempertimbangkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* di dalam merumuskan suatu tindak pidana perjudian, mana bentuk perjudian yang bersifat umum dan mana perjudian yang bersifat khusus. Serta kepada pemerintah diharapkan menutup/memblokir semua konten di internet yang memiliki muatan perjudian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Masyarakat lebih mudah dalam melakukan setiap aktivitasnya. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tidak terbatas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Pada saat ini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi pedang bermata dua ada dampak positif juga ada dampak negatif, tergantung bagaimana masyarakat menggunakannya. Oleh karena itu, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, ia juga sekaligus menjadi sarana efektif di dalam melakukan sebuah kejahatan. Peningkatan kualitas kejahatan tersebut diwarnai dengan semakin bervariasinya bentuk-bentuk kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, maka berbagai macam kejahatan yang berbentuk penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin besar, salah satunya yaitu tindak pidana perjudian. Tindak pidana perjudian sendiri sudah mengalami perkembangan yakni dalam bentuk perjudian *online (internet gambling)*.

Di Indonesia perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenakan sanksi pidana. Karena pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi melihat dari kenyataan kehidupan yang berkembang saat ini, perjudian masih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam bentuknya.

[illegible]

Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pengertian daripada perjudian *online* itu sendiri. Akan tetapi, mengenai pengertian permainan judi dapat kita lihat di dalam KUHP. Pengertian permainan judi menurut KUHP pasal 303 ayat (3) yang berbunyi: yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Perjudian *online* dapat diartikan sebagai suatu permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

[illegible]

Terdapat sebuah kasus yang terjadi di Banyuwangi yaitu sebuah tindak pidana perjudian yang menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai pengantar. Tindak pidana perjudian *online* tersebut terjadi ketika terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 WIB. Terdakwa datang ke Warnet Naira dengan maksud untuk menyewa seperangkat komputer yang tersambung dengan internet untuk melakukan permainan judi jenis poker dan togel secara *online*, yakni dengan cara membuka situs judi poker: www.qqpokeronline.com dan situs judi togel: www.afatogel.com. Kedua permainan judi *online* tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan hanya bersifat untung-untungan saja yang mana setiap orang memiliki peluang untuk memperoleh kemenangan.

⁴ Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 157.

Di dalam hukum Islam, perjudian merupakan suatu yang dilarang karena bertentangan dengan norma-norma agama. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al- Maidah ayat 90-91, yaitu:

[illegible]

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga bentuk perbuatan pidana (*jarīmah*) yaitu, *jarīmah hudūd*, *jarīmah qisāh* dan *jarīmah ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁷ Wewenang untuk menetapkan nya diserahkan kepada *ulil amri*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Perjudian Poker dan Togel *Online* (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw).

[illegible]

1. Identifikasi Masalah

- a. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw.
- b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka diperlukan batasan masalah supaya permasalahan yang dikaji lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, oleh karena itu penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini dengan batasan:

- a. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw.
- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw.

Adapun rumusan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- #### D. Kajian Pustaka

Berangkat dari survey atau pencarian penulis di digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan. Namun berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:

- ⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2016), 8.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Habiburrahman, 2018 : Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor: 136/Pid.B/2015/PN. Spg. Dalam skripsi ini penulis menitik beratkan pada pembuktian tindak perjudian *online* dalam konteks hukum acara pidana Islam. Dan juga mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/PN. Spg.¹⁰
3. Skripsi tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian *Online* Di kota Makassar (studi putusan: 587/Pid.B/2013/PN.Mks) yang ditulis oleh Risman yang mana dalam skripsi ini membahas pokok masalah penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian online di kota Makassar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku perjudian *online* dengan nomor register perkara 587/Pid.B/2013/PN.Mks di Makasar.¹¹

¹⁰ Muhammad Habiburrahman, Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

[illegible]

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan Nomor 521/Pid.B/2018/PN Byw sebab dalam putusan tersebut hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali*. Di mana hakim memutus terdakwa dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP padahal dalam perkara tersebut terdakwa juga didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana Undang-undang tersebut termasuk dalam Undang-undang khusus.

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hukum hakim yang kurang memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generali* dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perjudian.

[illegible]

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw.

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai upaya dalam pengembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum pidana Islam. Dan juga sebagai acuan untuk referensi penelitian atau kajian ilmiah tentang eksistensi pemberantasan kasus perjudian *online*.

2. Aspek terapan (praktis), dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian *online* serta dapat dijadikan masyarakat khususnya para pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian *online*.

[illegible]

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam adalah analisis dari kaca mata ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam. Yang dimaksud hukum pidana dalam penelitian ini adalah hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* sendiri adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.
2. Tindak Pidana Perjudian *Online* adalah suatu permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

[illegible]

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23.

1. Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta. 2010.
2. Ibrahim Hosen. *Apakah Itu Judi*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an. 1987.
3. Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
4. Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinay al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1,t.t.)
5. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
6. Adam Chazawi. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Mnc Publishing. 2011.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan

dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat dan baik dari sumber primer maupun sekunder¹⁷, tentang kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum pidana Islam yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Analizing*, yaitu memberikan analisa tinjauan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dalam putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw.

5. Teknik analisis data

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 125-126.

Bab II, bab ini akan mengemukakan tentang tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dan sanksi hukumnya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam yang dimaksud adalah *ta'zīr* yang meliputi: pengertian *ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, macam-macam sanksi hukuman *ta'zīr*, tujuan *ta'zīr*, macam-macam *jarīmah ta'zīr*.

Bab III, berisi tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dan dasar putusan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisa pertimbangan Hakim dan pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw tentang tindak pidana perjudian poker dan togel *online*.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Banyuwangi dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

BAB II

1. Pengertian Tindak Pidana

Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesadaran oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Adapun beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian *strafbaar feit* (tindak pidana) adalah:²

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 87.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2011), 97.

masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi atau tidak.

2. Pengertian Perjudian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi (sebagai kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi (sebagai kata kerja) yaitu mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari harta semula.⁴

Adapun pengertian perjudian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, dimana pihak yang kalah

³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 22-23.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 479.

memberikan uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.⁵

- b) Menurut Ibrahim Hosen, judi yaitu suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.⁶
- c) Menurut Kartini Kartono perjudian ialah mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang belum pasti hasilnya.⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian mengenai perjudian adalah suatu permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka dan ada suatu yang dipertaruhkan berupa uang atau barang bernilai lainnya yang disepakati oleh kedua pihak dan diserahkan pada pihak yang menang dalam permainan tersebut.

Dilihat dari bahaya perjudian maka dapat dikatakan bahwa salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, di antaranya yaitu:

- Merusak ekonomi keluarga
- Mengganggu keamanan masyarakat,
- Melumpuhkan semangat berkreasi,
- Menghabiskan waktu dan lain sebagainya.

⁵ Hasan Muarif Ambari, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998), 297.

⁶Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi...*, 21

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 52

3. Tindak Pidana Perjudian Dalam KUHP

Tindak pidana perjudian dalam pembentukan Undang-undang telah diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP. Tentang jenis-jenis permainan mana dan perbuatan-perbuatan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai permainan judi, pembentuk Undang-undang telah menjelaskannya didalam ketentuan yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.⁸

Sementara itu, ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 sampai 3 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan sesuatu itu bukanlah merupakan perbuatan bermain judi, karena yang dilarang di dalam ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal tersebut adalah perbuatan-perbuatan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan keturutsertaan dalam perbuatan seperti itu.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal dari Undang-undang yang sama, telah dipandang sebagai kejahatan.

4. Tindak Pidana Perjudian Dalam Undang-Undang ITE

⁸ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 301.

Di Indonesia dalam menanggulangi *cyber crime* dibuatlah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengakomodir semua tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber crime* yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Tindak pidana perjudian juga diatur dalam undang-undang tersebut yakni terdapat pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

[illegible]

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap tindak pidana perjudian yang menggunakan media elektronik maka termasuk dalam tindak pidana perjudian yang bisa dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas penting yang tercantum dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Asas ini sangat penting bagi hukum pidana bahkan kata Utrecht, sangat untuk seluruh hukum. Van Hattum menyebutnya sebagai *logische specialiteit* atau dalam bahasa Indonesianya adalah kekhususan yang logis (ada juga yang memakai terjemahan spesialisitas yang logis).¹⁰

Menurut asas *lex specialis derogat legi generali*, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditentukan kembali di dalam peraturan

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 453.

- a) Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok pada tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang terdapat dalam *lex generalis*.
- b) Ruang lingkup tindak pidana *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama.
- c) Terdapat persamaan subjek hukum antar tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalisnya* orang, maka subjek hukum *lex specialisnya* juga harus orang.
- d) Terdapat persamaan obyek tindak pidana antara *lex specialis* dan objek *lex generalis*.

¹² Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Mnc Publishing, 2011), 54.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian, yaitu:¹³

- ¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

situ terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum.¹⁵

Permainan judi togel merupakan permainan judi yang menggunakan nomor sebagai alat permainannya. Nomor togel dimulai dari nomor 01-00 (yakni 100), untuk 1 nomornya seharga 1000 rupiah, sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Hadiah untuk 2 angka mendapatkan 60.000 rupiah, hadiah 3 angka mendapatkan 300.000 rupiah, sedangkan untuk 4 angka mendapatkan 2.000.000 rupiah. Itu pun berlaku kelipatan seperti: membeli 3 angka sebanyak 4 kali, apabila 3 angka tersebut keluar akan mendapatkan 300.000 rupiah dikalikan 4 yakni sebanyak 1.200.000 rupiah. Sedangkan jumlah nomor yang akan keluar keseluruhannya adalah 4 nomor.¹⁶

Untuk hari permainan judi togel ada 4 hari dalam satu Minggu yaitu Senin, Kamis, Sabtu, dan Minggu, yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB. untuk pengumuman nomor-nomor yang keluar, diumumkan kira-kira pada sore harinya atau sekitar pukul 18.00 WIB yakni setelah Maghrib.

2) Poker

¹⁵ Karolina Sitepu, *Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan*, No. 1, Vol. 1 (Januari, 2015), 6.

¹⁶ Ibid.,

Judi poker merupakan salah satu jenis judi kartu, permainan judi ini menggunakan media kartu alat ukur untuk mengetahui siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah. Permainan judi poker harus dimainkan lebih dari satu orang dalam satu meja dan biasanya tersedia 6 sampai 9 kursi yang dapat dimainkan.

Dalam menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam permainan judi ini dapat diketahui dari kombinasi kartu yang didapatkan dalam permainan tersebut. Adapun pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi maka akan menjadi pemenang dalam permainan judi poker tersebut.

Berikut nilai kombinasi kartu poker mulai dari tertinggi sampai terendah:

- a) *Royal Flush* yaitu kombinasi lima buah kartu dengan kondisi semua bunga sama dan berurutan dari 10 J Q K AS.
- b) *Straight Flush* yaitu kombinasi lima buah kartu dengan kondisi bunga kelima kartu tersebut sama dan berurutan di bawah angka 10.
- c) *Four of Kind* yaitu kombinasi lima buah kartu dengan kondisi terdapat 4 kartu yang mempunyai angka sama.
- d) *Full House* yaitu kombinasi lima buah kartu dengan kondisi terdapat tiga buah kartu yang sama angkanya dan satu buah *pair* (dua angka yang sama).
- e) *Flush* yaitu kombinasi lima buah kartu dengan kondisi kelima kartu tersebut memiliki bunga yang sama jenis.

- ## B. Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Islam

Judi dalam bahasa Arab adalah *maisir* (مَيْسِر) atau *qimār* (قِمَار).¹⁸ Kata *maisir* berasal dari kata يَسِرُّ yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa saja yang kalah dalam permainan *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.¹⁹ Sedang menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), 24-25.

32

Dalam Islam perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilarang, karena akibat yang ditimbulkan dari perjudian lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat al- Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١١١

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Asbabun nuzul dari ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw datang ke Madinah dan menjumpai para sahabat minum *khamr* dan sedang bermain judi. Kemudian mereka (para sahabat yang minum *khamr* dan sedang bermain judi) bertanya kepada Rasulullah mengenai hal tersebut dan turunlah ayat ini. Mereka memahami dari ayat ini bahwa tidak diharamkan minum *khamr* dan judi, hanya dosa besar bagi pelakunya dan mempunyai bahaya yang lebih besar dari manfaatnya.²¹ Sesudah itu maka turunlah ayat yang lebih tegas

²⁰ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), 171.

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi - juz 2*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 239-240.

yang menyuruh mereka untuk berhenti meminum *khamr* dan bermain judi, yaitu surat al-Maidah ayat 90-91:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ١١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Setelah turunnya ayat ini mengenai penegasan tentang larangan minum *khamr* dan berjudi, mereka berkata: “Ya Tuhan kami, kami pasti berhenti minum *khamr* dan berjudi.”²² Allah melarang berjudi karena bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Bahaya main judi sama besarnya dengan bahaya minum *khamr*. Bahaya yang ditimbulkan dari akibat main judi bisa berdampak mulai dari permusuhan, perselisihan bahkan sampai berdampak pada pembunuhan. Oleh sebabnya judi dilarang baik dari agama maupun negara.

Adapun hadis mengenai larang bermain judi yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari:

²² Zaini Dahlan, Universitas Islam Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 366.

عَصَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرَدِّ فَقَدْ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ

Artinya: Dari Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi Saw. bersabda: siapa bermain dadu (judi), maka sungguh berarti dia itu durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Abu Daud).²³

2. Hukuman Bagi Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Islam

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hukuman *jarīmah* (tindak pidana) dalam Islam jika ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan hadis. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua diantaranya hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudūd*, *qisas*, *diyat*, dan *kafarah*, serta hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*.²⁴

Perjudian dalam Islam merupakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku *jarīmah* tersebut belum ditentukan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis, atau yang sering kita sebut dengan istilah hukuman *ta'zīr*. Berikut penjelasan mengenai *ta'zīr*:

a. Pengertian *Ta'zīr*

Ta'zīr menurut bahasa adalah *mashdar* (kata dasar) bagi عَزَرَ yang berarti الرَّدُّ وَ الْمُنْعُ (mencegah dan menolak) sementara pengertian kedua التَّأْدِيبُ (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili. *Ta'zīr*

²³ Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Abu Daud*, no. Hadis 4938.

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. . . , 28.

Menurut istilah, *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudūd*. Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan perbuatan dosa dan pelakunya. Adapun menurut Wahbah Zuhaili memberi definisi *ta'zīr* menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan berdasarkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kafarah*. Sementara sanksi-sanksi *ta'zīr* adalah hukuman-hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan/ditentukan mengenai ukurannya.²⁶

²⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Quran (IIQ), 1987), 24-25.

[illegible]

Dalam menentukan *jarīmah ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Selain itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip-prinsip *syar'i (nash)*.

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw. Dan tindakan para sahabat nabi. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut:²⁹

عَنْ جَزْرِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِيهِ
 التُّهْمَةَ (رواه ابو داود الترمذى والنسائى والبيهقى و صححه الحاكم)

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252-253.

Artinya: Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).³⁰

2) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (*Muttafaq alaihi*).³¹

3) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْبِلُوا دَوَىِ الْهَيْئَاتِ عَشْرًا تَهْمُ إِلَّا الْخُدُودَ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي)

Artinya: Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarīmah-jarīmah hudud*. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Baihaqi).³²

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak

³⁰ Hussein Bahreish, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta: Widjaya, 1983). 255.

³¹ Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Shahih Muslim*, no. Hadis 3222.

³² Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Abu Daud*, no. Hadis 3803.

Adapun tindakan sahabat nabi yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarīmah* dan hukuman *ta'zīr* salah satunya yaitu tindakan Sayidina Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelantarkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: “Asah pisau itu!”.³⁴

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana (*jarīmah*) jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.³⁵

Artinya ada sesuatu yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilarang. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.

³³ Ibid.

³⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. . ., 142.

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. . . , 3.

3) Pelaku kejahatan adalah *mukallaf*

Apabila ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan *jarīmah*. Tanpa ketiga unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarīmah*.

Tujuan utama sanksi *ta'zīr* adalah sebagai *preventif* dan *represif* serta *kuratif* dan *edukatif*. Atas dasar ini *ta'zīr* tidak boleh membawa kehancuran. Berikut tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zīr* yaitu sebagai berikut:³⁶

Yang dimaksud dengan fungsi *preventif* adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang

[illegible]

- 1) *Jarīmah Hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenis *jarīmahnya* ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh *syar'i* diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, dan menghina agama.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya.

1) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah

Yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi,

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. . ., 162.

b) Hukuman Jilid

⁴³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jinayah*. . ., 149.

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. . ., 191.

⁴⁵ Ibid., 199.

3) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

4) Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *Ulul Amri* demi kemaslahatan umum

a) Peringatan keras

⁴⁹ Ibid., 205.

⁵⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. . ., 158.

⁵¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. . ., 211-218.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. . ., 268.

Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abidin yang dimaksud dengan sanksi *ta'zīr* berupa nasihat adalah memperingatkan si pelaku *jarīmah* bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh *Ulil Amri* adalah nasihat yang harus diucapkan oleh hakim.⁵⁵

f) Pemecatan dari jabatan

g) Diumumkan kejahatannya (*At- Tasyhir*)

⁵⁶ Ibid., 216.

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR
521/PID.B/2018/PN BYW TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN
POKER DAN TOGEL *ONLINE***

1. Kronologi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 521/Pid.B/2018/PN Byw. ini dijatuhkan kepada terdakwa Gurun Tri Gunaan bin Matlawi. Terdakwa lahir di Banyuwangi tanggal 24 Mei 1984 dan berusia 34 tahun dengan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Jalan Letnan Sulaiman No. 43, RT.01/RW.01. Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.¹

Dalam perkara ini terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum agar terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303

48

Mengenai surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan 3 (tiga) pasal dakwaan yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 303 bis ayat(1) ke-1 KUHP, pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum di atas, terdakwa melakukan tindak pidana ini berawal dari terdakwa Gurun Tri Gunawan bin Matlawi pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 sekiranya pukul 14.30 WIB, beretempat di Warnet Naira di Jalan Ikan Tenggiri No. 08, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang dengan sengaja

³ Ibid., 3.

⁴ Ibid., 8.

Sedangkan cara untuk perjudian togel online sebagai berikut: setelah masuk ke akun judi togel, lalu terdakwa memilih bandar Singapura kemudian mengetik angka yang dicolok, saat itu terdakwa colok angka 4 (empat). terdakwa bertaruh uang sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah). Bila angka judi togel tersebut keluar pada sore harinya angka 4, maka terdakwa berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 27.00 (dua puluh tujuh ribu rupiah). Besaran nilai kemenangan yaitu sebagai berikut: untuk satu angka mendapatkan kemenangan sebesar 50% dari angka taruhan, untuk dua angka mendapatkan 70 kali lipat dari nilai taruhan, untuk tiga angka mendapatkan 400 kali lipat, untuk empat angka

Permainan dengan menggunakan media *online* yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang mana setiap orang memiliki peluang untuk memperoleh kemenangan. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian yang ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan beberapa barang bukti.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan alternatif penuntut umum yang karena bentuknya tersebut maka majelis hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur barangsiapa

Barangsiapa dalam unsur kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak

Penuntut umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh majlis hakim mengaku bernama Gurun Tri Gunawan bin Matlawi lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitasnya tersebut bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara pidana nomor 21/Pid.B/2018/PN Byw sehingga dengan demikian maka majlis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁵

- 2) Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat di ketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh saks Erwin Sanjaya, SE. Dan saksi Azmal Rahardian Hasbiallah (keduanya anggota Satreskrim pada Polres Banyuwangi) pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Warnet Naira yang terletak di Jalan Ikan Tengiri No. 08, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi karena

[illegible]

main judi poker *online* dengan menggunakan taruhan uang sehingga terdakwa diperiksa lalu ditangkap.

Terdakwa melakukan permainan jenis poker *online* dan togel *online* dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara terdakwa membuka situs judi poker yaitu www.qqpokeronline.com dan situs judi togel yaitu www.afatogel.com. Setelah masuk ke akun judi poker, lalu terdakwa mengklik Texas Poker kemudian memilih meja yang masih berisi 4 pemain dan mulai melakukan judi poker. Terdakwa memilih meja taruhan terkecil bernilai Rp. 200, (dua ratus rupiah) dan Rp. 400, (empat ratus rupiah) dimana masing-masing pemain lalu mendapatkan dua buah kartu kemudian di tengah meja dibuka tiga buah kartu, bila ada kartu yang dirasa jadi maka pemain bisa menambahkan nilai taruhan (*raise*) dan pemain yang lain ingin ikut nilai taruhan bisa ikut (*check*). Namun bila pemain yang merasa kartunya jelek, bisa tidak ikut taruhan (*fold*) menunggu hingga putaran berikutnya.

Perjudian togel *online* dilakukan oleh terdakwa dengan cara setelah masuk ke akun judi togel, lalu terdakwa memilih bandar singapura kemudian mengetik angka yang dicolok, saat itu terdakwa colok angka 4 (empat). Terdakwa bertaruh uang sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah). Permainan judi *online* yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan yang mana setiap orang memiliki peluang

Oleh karena itu, keseluruhan unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua surat dakwaannya telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa harus dipersalahkan telah melakukan tindak pidana tersebut dengan kualifikasi tindak pidana: “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”.

⁶ Ibid., 22.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (bulan).
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa seperangkat computer (dikembalikan kepada saksi Dewi Kurnianda Sari), 3 (tiga) lembar buktri tranfer bank BCA dari rekening tersangka Sdr. Gurun Tri Gunawan bin Matlawi sebesar Rp. 50.000 (dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) kartu Paspor Gold Debid BCA nomor kartu: 5307 9520 0529 5606 (dikembalikan kepada terdakwa Gurun Tri Gunawan).
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).⁸

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

⁸ Ibid., 24.

Pasal 303:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :
 - (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 *bis*:

- [illegible]

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN TINDAK
PIDANA PERJUDIAN POKER DAN TOGEL *ONLINE* DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR: 521/PID.B/2018/PN BYW**

Menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim mempunyai independensi kekuasaan dalam memutus sebuah perkara.¹ Namun dalam memutus perkara, hakim tetaplah harus berpedoman terhadap peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.² Dalam pasal ini mengartikan bahwa hakim diwajibkan untuk menggali fakta-fakta hukum dalam sebuah perkara untuk menghasilkan sebuah putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan rasa keadilan.

Dalam putusan nomor 521/Pid.B/2018/PN Byw terdakwa Gurun Tri Gunawan bin Matlawi dihadapkan dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang bersifat alternatif, artinya hakim bisa memilih dakwaan manakah yang paling

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 3 pasal dakwaan yakni pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Majelis hakim pengadilan negeri Banyuwangi yang menangani kasus tersebut menjadikan pasal 303 bis ayat 1 ke (1) KUHP sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan putusan dalam perkara perjudian poker dan togel *online* yang dilakukan oleh terdakwa Gurun Tri Gunawan bin Matlawi. Adapun sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim mempunyai beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan yakni hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian dan meresahkan masyarakat. Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Selain itu terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Adapun dalam kasus tindak pidana perjudian poker dan togel *online* ini majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Barangsiapa;

2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut majelis hakim memutus terdakwa dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya dengan hukuman pidana penjara selama 6 (bulan) dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Dengan ketentuan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Apabila dikaitkan dengan alat bukti, keterangan terdakwa, serta keterangan saksi. Maka pengertian tindak pidana perjudian poker dan togel *online* kurang sesuai jika dikaitkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Tindak pidana perjudian tidak hanya diatur dalam KUHP saja akan tetapi juga diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui kesesuaian tindak pidana perjudian yang dimaksud dalam putusan tersebut, penulis mencoba menguraikan unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (2) berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.

Terdapat tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat (2) yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Meskipun diantara ketiga perbuatan tersebut dipisahkan dengan frasa “dan/atau”, tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang

sama. Logika pencantuman perkataan “dan/atau”, bahwa antara ketiga perbuatan tersebut bisa terjadi bersamaan dalam suatu peristiwa dan juga bisa terjadi salah satu saja.

Mendistribusikan berasal dari kata distribusi yang mempunyai arti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat.³ Jika dihubungkan dengan unsur obyek, maka perbuatan mendistribusikan yaitu menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan informasi elektronik/dokumen elektronik yang isinya mempunyai muatan perjudian.

Mentransmisikan berasal dari akar kata transmisi yang artinya pengiriman (penerusan), penyebaran, penularan, dan lain sebagainya dari seseorang kepada orang atau benda lain.⁴ Sementara mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Perbuatan mentransmisikan dan mendistribusikan sebenarnya mempunyai sifat yang sama. Maksudnya ialah dengan kedua perbuatan tersebut, maka suatu informasi menjadi tersalurkan ke tujuan.

Kata ‘membuat dapat diaksesnya’ merupakan kata yang abstrak, berbeda dengan kedua kata sebelumnya (mendistribusikan dan mentransmisikan) yang dirumuskan dengan kata yang kongkret. Kata akses artinya jalan masuk,⁵ kata akses ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terdapat dalam hal penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer. Membuat dapat diaksesnya adalah menjadikan

³ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), 90.

⁴ Ibid., 371.

⁵ Ibid., 18.

informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima informasi elektronik. Dengan kata lain bahwa terdakwa termasuk melakukan membuat dapat diaksesnya suatu website yang memiliki muatan perjudian dengan cara membuat akun di website tersebut.

Menurut penulis, dari uraian-uraian unsur pasal 303 bis ayat (2) ke-1 KUHP maupun pasal 27 ayat 2 Undang-undang ITE dan dari alat bukti serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut maka perbuatan terdakwa sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian *online* sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2), karena dari uraian unsur pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta yang terdapat pada putusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut bahwa dari ketiga pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hakim lebih memilih pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal yang akan dibuktikan dalam perkara tindak pidana perjudian poker dan togel *online*. Padahal disana terdapat pasal yang lebih khusus menangani tindak pidana perjudian yang berkaitan dengan teknologi informasi atau yang lebih kita kenal dengan istilah *cyber crime* yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, apabila terlalu dipaksakan menggunakan KUHP maka terdapat beberapa kendala terkait efektivitas substansi hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian poker dan togel *online* diantaranya kendala legalitas hukum, kendala pembuktian, dan kendala

juridiksi. Maka berdasarkan hal tersebut diperlukan peraturan yang lebih khusus menangani tindak pidana yang tergolong dalam *cyber crime*.

Pada sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah asas hukum, yang mana asas hukum ini harus dijalankan oleh semua aparat penegak hukum. Apabila tidak dijalankan maka akan membuat produk hukum yang dihasilkan mengalami suatu kesalahan atau yang biasa kita kenal dengan istilah cacat hukum. Maka dari itu dalam menerapkan sebuah hukum aparatur penegak hukum harus menjunjung tinggi asas-asas yang terdapat pada konstruksi hukum kita.

Pembentuk Undang-undang kita telah mengatur tentang suatu kemungkinan perilaku itu memenuhi rumusan suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, akan tetapi pada saat yang bersamaan juga memenuhi ketentuan pidana yang bersifat khusus pula. Kemungkinan seperti itu telah diatur oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dalam hal semacam ini, sebagaimana disebutkan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP, apabila ketentuan yang disebutkan terakhir itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus

diberlakukan. Atau dengan perkataan lain, dalam hal semacam itu berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan *lex specialis derogat legi generalis*.

Ketentuan pidana seperti yang diatur di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP itu sebenarnya bukan hanya harus diperhatikan oleh hakim semata, akan tetapi juga menjadi dasar oleh penuntut umum di dalam membuat dakwaan atau tuntutan yang diberlakukan terhadap terdakwa. Apabila penuntut umum hanya mencantumkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum di dalam surat dakwaannya, dan di dalam sidang pengadilan kemudian terdakwa terbukti bahwa perbuatan-perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana yang diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus, maka hakim harus membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, walaupun benar-benar semua unsur dari tindak pidana yang telah dituduhkan oleh penuntut umum di dalam surat tuduhannya itu dapat dibuktikan secara sah.⁶

Di dalam kasus ini, jaksa penuntut umum sudah mencantumkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka sesuai fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusan tersebut, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mempertimbangkan pasal tersebut sebagai bahan pertimbangan hukum. Karena pasal tersebut merupakan pasal yang bersifat khusus terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan menggunakan teknologi informasi elektronik.

⁶ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. . ., 736.

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut keji atau tidak akan tetapi lebih didasarkan pada sejauh mana kerugian diderita oleh masyarakat. Sedangkan dalam hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak ahlak, karena jika ahlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.⁸

⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. . ., 8.

penguasa untuk menetapkan dan hakim harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang.⁹

Dalam *jarīmah* perjudian poker dan togel *online* ini, pelaku dijatuhi hukuman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Perjudian dalam perspektif hukum pidana Islam tidak dijelaskan mengenai ketentuan hukuman terhadap pelaku *jarimah* perjudian. Akan tetapi dalam al-Qur'an perjudian merupakan perbuatan yang dilarang karena bahaya yang ditimbulkan dari perjudian lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Larangan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ١١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz I*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1996), 81.

Dari paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa perjudian dalam apapun bentuknya, baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau *cyber crime* tidak akan lepas dari hukuman, oleh karena mengganggu ketertiban umum yang sangat dipelihara oleh Islam. Seiring dengan itu di dalam hukum positif dikenal dengan adagium “setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlaku tanpa hukum” (*aut punire aut de dere, nullum crimen sine poena*).

[illegible]

Dalam amar putusan pengadilan negeri Banyuwangi nomor 521/Pid.B/2018/PN Byw. terdakwa perjudian poker dan togel *online* dihukum dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Jika dikaitkan dalam hukum pidana Islam hukuman tersebut masuk di dalam kategori hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Dan termasuk di dalam jenis hukuman penjara yang dibatasi waktunya karena sudah disebutkan secara tegas di dalam amar putusan tersebut yakni pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

[illegible]

Pada putusan tindak pidana perjudian poker dan togel *online* yang dilakukan oleh terdakwa Gurun Tri Gunawan, penulis menilai bahwa majelis hakim kurang teliti di dalam memutuskan perkara tersebut. Majelis hakim memutus terdakwa dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang seharusnya berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam putusan tersebut terdapat Undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang tindak perjudian *online* yakni pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini bertentangan dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang tertuang dalam pasal 63 ayat (2) KUHP.

¹¹ Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), 155.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor:521/Pid.B/2018/PN Byw tentang tindak pidana perjudian poker dan togel *online* yang didasarkan pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yakni menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini majelis hakim memutus terdakwa perjudian poker dan togel *online* dengan menggunakan KUHP, dan kurang mempertimbangkan salah satu asas hukum yakni asas *lex specialis derogat legi generalis* yang tertuang dalam pasal 63 ayat (2) KUHP. Yang seharusnya dalam tindak pidana perjudian *online* sudah diatur lebih khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. *Jarīmah* perjudian poker dan togel *online* dalam hukum pidana Islam merupakan jenis *jarīmah* yang tergolong baru, yang mana ketentuan hukumannya belum ditentukan oleh *shara'*. Akan tetapi konteks dari *jarimah* tersebut adalah sama yakni berupa perjudian, perjudian sendiri dalam al-Qur'an merupakan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman bagi pelaku *jarīmah* perjudian dalam Islam memang belum ditentukan oleh *shara'* oleh karena itu di dalam menetapkan hukuman diserahkan kepada pemerintah (hakim) yang berkuasa untuk

1. Kepada para aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim, diharapkan lebih mempertimbangkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* di dalam memetakan atau merumuskan suatu tindak pidana perjudian, mana bentuk perjudian yang bersifat umum dan mana bentuk perjudian yang bersifat khusus. Sehingga terwujudnya suatu kepastian hukum di negara Indonesia.
2. Kepada pemerintah sesuai dengan komitmen negara kita dalam pemberantasan tindak pidana perjudian diharapkan menutup/memblokir semua konten di internet yang memiliki muatan perjudian supaya tidak ada lagi akses perjudian melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik. A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika. 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Awdah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah. Juz 1.
- Chazawi, Adam. Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Mnc Publishing.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw". <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bbf0875fdeb8038c2db498862cd4f9c4>.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama. 2011.
- Habiburrahman, Muhammad. *Tinjaun Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg. Skripsi-UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2018*.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1970.
- HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqh Junayah)*. Surabaya: Putaka Idea.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an. 1987.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali. 1992.
- Lamintang, PAF. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- _____, PAF. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Lubis, Zulkarnail. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Magdalena, Merry. Maswigrantoro Roes Setyadi. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: Andi. 2007.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pengadilan Negeri Banyuwangi". <http://pn-banyuwangi.go.id/sejarah-pengadilan-3>.
- Mauludin, Bagus. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/Pn.Dps Tentang Perjudian Sabung Ayam di Denpasar, Skripsi-UIN Sunan Ampel. Surabaya*.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- _____. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1983.
- Muarif, Hasan. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1998.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.
- Muslich, Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Risman. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Dikota Makassar (studi putusan: 587/Pid.B/2013/PN. Mks)*. Skripsi-UIN Alauddin. Makasar. 2015.
- Sadi, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Santoso, Lukman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press. 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media. 2015.
- Soekanto, Soerono. Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Susanti, Dyah Ochtorina. A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

